

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

## **Keputusan**

Keputusan Presiden Nomor 62/M Tahun 1998

Keputusan Presiden nomor 122/M Tahun 1998 tentang Kabinet Reformasi  
Pembangunan

Keputusan Presiden nomor 355/M Tahun 1999

Keputusan Presiden nomor 187/M Tahun 2004

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang  
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja  
Periode Tahun 2014-2019

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 536/Kpts/KPU/Tahun 2014

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014

## **Buku**

A.R, Hanta Yuda, 2010, Presidensialisme Setengah hati: dari Dilema ke Kompromi,  
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Asshiddiqie, Jimly, 2006, Hukum Acara Pengujian Undang-undang, Konstitusi Press,  
Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Penerbit Sekretariat  
Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta

Asshiddiqie, Jimly, 2010, Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers, Jakarta

Asyiah, Nur, 2015, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Deepublish,  
Yogyakarta.

Bailey, Jeremy D., 2007, Thomas Jefferson and Executive Power, Cambridge  
University Press

Darmodiharjo, Darji, dan Shidarta, 2006, Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan  
Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Elliott, Mark, 2001, The Constitutional Foundations of Judicial Review, Hart  
Publishing.

- Ghiffar, Abdul, 2009, Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju, Kencana.
- Indrati, Maria Farida, 2007, Ilmu Perundang-undangan 2 (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan), Kanisius, Yogyakarta
- Lembaga Administrasi Negara, 2006, Kajian Tentang Posisi Yuridis Keputusan Administrasi Di Luar Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munte, Hardi, 2017, Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada, Puspantara, Medan
- Neno, Victor Yave, 2006, Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pudyatmoko, Y. Sri, , 2009, Perizinan: problem dan upaya pembenahan, Grasindo, Jakarta.
- Prins, W.F. dan R. Kosim Adisapoetra, 1989, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Said, Umar, 2011, Pengantar Hukum Indonesia – Sejarah dan Dasar-dasar Tata Hukum serta Politik Hukum Indonesia, Setara Press, Jawa Timur.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta
- Sunggono, Bambang, 1997, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Surbakti, Ramlan, 1992, Memahami Ilmu Politik, Grasindo, Jakarta.
- Utrecht, E., Pengantar dalam Hukum Indonesia, Penerbit Ichdisar, Jakarta
- Utrecht, E., 1994, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Pustaka Tirta Mas, Surabaya

## **Jurnal**

- Adhayanto, Oksep, 2011, Eksistensi Hak Prerogatif Presiden Pasca Amandemen UUD 1945, Jurnal FISIP UMRAH Vol. 2, No. 2.
- Asshiddiqie, Jimly dalam Ni'matul Huda. 2001, Hak Prerogatif Presiden Dalam Perpektif Hukum Tata Negara Indonesia, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, No. 18, Vol. 8
- Huda, Ni'matul, 2001, Hak Prerogatif Presiden Dalam Perpektif Hukum Tata Negara Indonesia, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, No. 18, Vol. 8.
- Ibrahim, Johnny, Eksistensi Badan Hukum Di Indonesia Sebagai Wadah Dalam Menunjang Kehidupan Manusia, Law Review Volume XI No. 1 - Juli 2011
- Nugroho, Muchamad Arif Agung, 2012, Perintah Pejabat Tata Usaha Negara Melalui Telepon Dan Akibat Hukumnya, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI Vol. 6 No. 1 Januari.
- Salmon, Hendrik, 2010, Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan Yang Baik, Jurnal Sasi Vol. 16 No. 4 Bulan Oktober – Desember 2010
- Sina, La, 2010, Kedudukan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Sistem Hukum Indonesia, Jurnal Hukum Pro Justitia volume 28 no. 1
- Waleleng, Jandi Oklen, 2015, Kedudukan Peraturan Dprd Dalam Rangka Optimalisasi Peraturan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Minahasa, Lex Administratum, Vol. III/No. 7/Sep/2015

## **Website**

- Douglas Harper, Etymological Dictionary, <http://www.etymonline.com/>, diakses dari situs Online Etymology Dictionary pada tanggal 17 Maret 2017
- Sitharesmi Dien MD, “Rangkuman Hukum Tata Negara” <https://id.scribd.com/doc/13753602/rangkuman-Hukum-Tata-Negara> diakses dari situs Scribd.com pada tanggal 3 Maret 2017
- <http://kbbi.web.id/prerogatif>, diakses dari situs KBBI Online pada tanggal 3 Maret 2017

Kajian Desain Kelembagaan, <http://ppid.lan.go.id/wp-content/uploads/2014/10/Kajian-Desain-Kelembagaan.pdf>, diakses pada 20 April 2017, pukul 21.00 WIB.

Jokowi Bentuk Tim Transisi Kekuasaan, <http://www.dw.com/id/jokowi-bentuk-tim-transisi-kekuasaan/a-17830413> diakses dari situs berita DW.com pada 20 Juli 2017

Ini Persoalan Utama dan Dampak Kisruh DPR RI, <http://www.beritasatu.com/nasional/223485-ini-persoalan-utama-dan-dampak-kisruh-dpr-ri.html> diakses dari situs berita beritasatu.com pada tanggal 14 April 2017